

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding dengan era sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (desentralisasi fiskal). Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah (Azhar, 2008).

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan Presiden dan Gubernur, Bupati, Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem

informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi (Sri Dewi Wahyundaru, 2001).

Dalam sektor publik (pemerintahan), standar akuntansi yang digunakan adalah SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik (Patton dan Bean, 2001). Beberapa pengungkapan yang terdapat dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang harus dibuat oleh pemerintah. Kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, akan mencerminkan kualitas, manfaat, dan kemampuan laporan keuangan itu sendiri (Suhardjanto, *et.al* (2010)). Dengan mengikut standar yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah telah mentaati SAP.

Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Konsep pengukuran kinerja yang hanya mengandalkan pada aspek finansial saja, saat ini mulai ditinggalkan, karena dianggap hanya mengejar tujuan profitabilitas (*profitability*) jangka pendek semata. Terlebih jika pengukuran kinerja dilakukan bagi organisasi pemerintah yang tidak berorientasi profit, maka sangat diperlukan ukuran-ukuran yang lebih komprehensif.

Kinerja pemerintah tidak hanya diukur melalui perspektif finansial saja tetapi juga dari perspektif non finansial seperti masalah pegawai yang dihubungkan dengan prestasi kinerja dan kualitas pelayanan publik. Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik namun demikian, apabila terjadi hal-hal yang terdapat penyimpangan dalam laporan keuangan maka terdapat indikasi temuan audit BPK sehingga temuan tersebut dapat dijadikan suatu alasan kenapa pemerintah daerah tersebut tidak menjalankan kinerja dengan baik. Secara umum, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangundangan (Florida:2007) Kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan

daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk mencapai tujuan tersebut disebut kinerja pemerintah daerah. Sehubungan dengan efektifnya otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah dalam keuangan daerah sangat dituntut untuk membiayai aktivitas daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah. Kinerja keuangan sendiri diukur dengan menggunakan berbagai rasio. Salah satunya menggunakan tingkat desentralisasi fiskal, yaitu pendapatan daerah per total penerimaan daerah, atau menggunakan rasio kemandirian, yaitu total pendapatan asli daerah per total bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan oleh Rukmana (2013) dengan menggunakan tiga variabel yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial hanya pajak daerah dan dana perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Provinsi Aceh, karena itu Pemerintah Provinsi Aceh sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Provinsi Aceh berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Aceh, untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Provinsi Aceh, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Provinsi Aceh apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Menurut Puspitasari (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2007-2011 sudah efektif, efisien dan pertumbuhan pendapatan meningkat. Namun tingkat kemandirian Pemerintah Kota Malang masih rendah dan sebagian besar dana masih digunakan untuk belanja rutin.

Afriyanto *et al* (2013) juga menemukan hasil bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu rata-rata sudah efektif, efisien dan mengalami pertumbuhan yang positif, tetapi tingkat kemandirian masih sangat rendah dan sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk belanja rutin daripada belanja modal.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui perkembangan dari kinerja keuangan pemerintah Provinsi Aceh. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah pada setiap periode untuk tujuan perbaikan kinerja di masa mendatang. Berdasarkan uraian dari atas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh dari Tahun 2013-2015**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalah yang akan diidentifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Provinsi Aceh jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Provinsi Aceh jika dilihat dari Rasio Kemandirian ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Provinsi Aceh jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Provinsi Aceh jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
5. Bagaimana kinerja keuangan Provinsi Aceh jika dilihat dari Rasio Keserasian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan pertanyaan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan Provinsi Aceh jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi.
2. Kinerja keuangan Provinsi Aceh jika dilihat dari Rasio Kemandirian
3. Kinerja keuangan Provinsi Aceh jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
4. Kinerja keuangan Provinsi Aceh jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
5. Kinerja keuangan Provinsi Aceh jika dilihat dari Rasio Keserasian.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai memberika referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu bukti tentang hubungan Memberikan masukan yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi informasi penting bagi penelitian Akuntansi Sektor Publik selanjutnya dan dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam.

3. Bagi Peneliti

penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh.